



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 347);
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN,
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
- BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD.

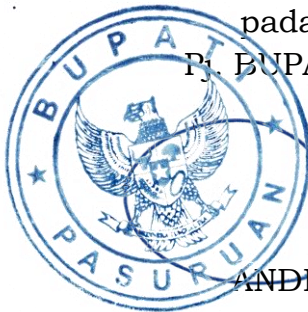
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 5 Agustus 2024

P. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

- I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- II. DINAS KESEHATAN;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- IV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XX. DINAS PERIKANAN;
- XXI. DINAS PARIWISATA;
- XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- XXIII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- XXIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XXV. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXVI. SEKRETARIAT DPRD;
- XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXX. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXXI. KECAMATAN BANGIL;
- XXXII. KECAMATAN BEJI;
- XXXIII. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXIV. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXV. KECAMATAN GRATI;
- XXXVI. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXVII. KECAMATAN KRATON;

- XXXVIII. KECAMATAN LEKOK;
- XXXIX. KECAMATAN LUMBANG;
- XL. KECAMATAN NGULING;
- XLI. KECAMATAN PANDAAN;
- XLII. KECAMATAN PASREPAN;
- XLIII. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLIV. KECAMATAN PRIGEN;
- XLV. KECAMATAN PURWODADI;
- XLVI. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLVII. KECAMATAN PUSPO;
- XLVIII. KECAMATAN REJOSO;
- XLIX. KECAMATAN REMBANG;
- L. KECAMATAN SUKOREJO;
- LI. KECAMATAN TOSARI;
- LII. KECAMATAN TUTUR;
- LIII. KECAMATAN WINONGAN;
- LIV. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

II. DINAS KESEHATAN

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

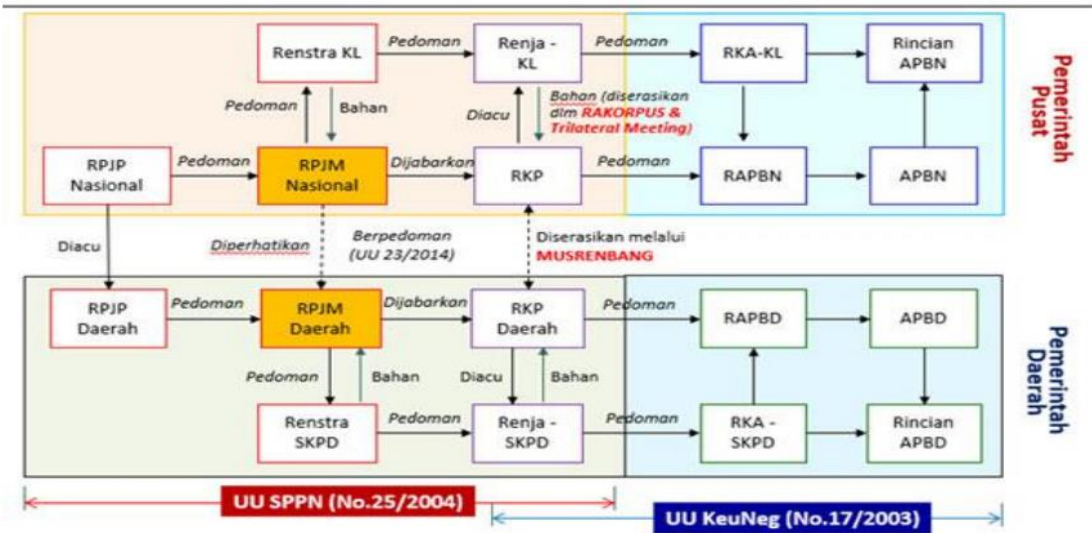
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah.

Dalam rangka penyusunan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) dan pemangku kepentingan. Sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, serta Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu *“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah”*.

Rancangan Renja Dinas Kesehatan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Penyusunan Renja PD nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian menjadi APBD. Berikut gambaran keterkaitan perencanaan penganggaran pusat maupun daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Gambar Diagram Keterkaitan Dokumen Renja K/L, Renja Propinsi dengan Renja PD



Dinas Kesehatan merupakan bagian perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan yang berada dibawah Pemerintahan Daerah. Kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang berkaitan dengan isu strategis dan masalah mendesak yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Pasuruan, karena menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, dalam upaya memenuhi sasaran yang harus di emban yaitu meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Urusan Kesehatan ini dilaksanakan oleh 1 (satu) satuan kerja yaitu Dinas Kesehatan yang didalamnya meliputi 2 (dua) Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK RSUD Bangil dan UOBK RSUD Grati), 33 (tiga puluh tiga) Unit organisasi bersifat fungsional (33 UOBF Puskesmas) dan 1 (satu) Unit Pelaksana terpadu Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Sebagai perangkat daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan harus menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Dinas Kesehatan untuk menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum pelaksanaan program kegiatannya, Dinas Kesehatan harus mampu membuat Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja untuk satu tahun kedepan, yang didalamnya mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan pada periode lima tahunan.

Dalam rencana kerja mempunyai muatan berupa program, kegiatan, lokasi dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya. Indikaor kinerja memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan kualitatif hasil yang akan dicapai dari program.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan di landasi oleh beberapa payung hukum sebagai berikut:

- 1.2.1 Landasan idiil Pancasila;
- 1.2.2 Landasan konstitusional UUD 1945;
- 1.2.3 Landasan operasional;

- 1.2.3.1 Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 1.2.3.2 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
- 1.2.3.3 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 1.2.3.4 Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700)
- 1.2.3.5 Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
- 1.2.3.6 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 1.2.3.7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
- 1.2.3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 1.2.3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578)
- 1.2.3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
- 1.2.3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

- 1.2.3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 1.2.3.14 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 1.2.3.15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.3.16 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam pembangunann Nasional;
- 1.2.3.17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum Pengarustamaan Gender di daerah;
- 1.2.3.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.3.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
- 1.2.3.21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 1.2.3.22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 1.2.3.23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 1.2.3.24 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 1.2.3.26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
- 1.2.3.28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- 1.2.3.29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan
- 1.2.3.30 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/Sk/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 1.2.3.31 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.32 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru Menteri Dalam Negeri;
- 1.2.3.33 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
- 1.2.3.34 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
- 1.2.3.35 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun Anggaran 2025-2026.
- 1.2.3.36 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- 1.2.3.37 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 177 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
- 1.2.3.38 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud penyusunan Rencana Kerja tahun 2025

- 1.3.1.1 Menjabarkan arahan umum Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan di kaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan.
- 1.3.1.2 Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan kesehatan.
- 1.3.1.3 Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana yang akan di jadikan salah satu kekuatan pembangunan kesehatan.
- 1.3.1.4 Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan Kesehatan

1.3.2 Tujuan:

- 1.3.2.1 Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antar bidang di lingkungan Dinas Kesehatan.
- 1.3.2.2 Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan.
- 1.3.2.3 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencan Kerja Dinas Kesehatan Pasuruan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, diawali dengan Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategiknya. Hal ini secara nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran strategik yang berada dalam ruang lingkup sesuai tugas pokoknya, yaitu membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Lebih jauh lagi jika dipandang dari perspektif Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan, maka hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 akan menjadi sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Meskipun demikian, hasil pencapaian tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dapat digunakan sebagai masukan - masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerjanya di masa - masa mendatang, khususnya terhadap target - target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja Tahun 2025.

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan capaian Tribulan II dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL 2.1 (T-C. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Urusan Bidang Kesehatan									
	Bidang Kesehatan									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standart	100					100	30	
SDK	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Faskes Sesuai Standar	70					70	33	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	33					20	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1					1	0	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24					24	0	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	40					40	0	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0					0	0	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0					0	0	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	33					4	2	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20					20	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	34					34	34	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan intervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						1.400	700	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular	80					80	80	
p2p	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Kasus TB dan HIV	80					80	80	
		Persentase Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	80					80	80	
		Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Tidak Menular	80					80	80	
		Persentase balita Gizi buruk	0 ,025					0 ,025	0 ,025	
		Persentase keluarga akses sanitasi bersih/sehat	90					90	90	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
		Persentase UHC	95					95	95	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19818					22.032	9.707	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	32864					32.838	17036	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4					4	2	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.282					4.282	2.141	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	242					242	121	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	198					100	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12					12	6	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4					4	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12					12	6	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1112308					1.069.546	549.245	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	402655					80.172	40.160	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26695					23.530	15.088	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3.174					3.191	1.769	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan pelayanan kesehatan	6.490					6.490	3.245	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	196.973					196.973	98.487	
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	3					3	3	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25093					24.670	11.499	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23953					24.522	11.794	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24047					23.253	11.786	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93860					93.434	46.022	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217968					219.853	55.599	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190933					212.911	99.821	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4					4	2	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4					4	2	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan	4					4	2	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan	4					4	2	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan kabupaten / kota sehat	4					4	2	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12					12	6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12					12	6	
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12					12	6	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat	36					36	12	
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1					12	6	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya /PMI	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4					4	2	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten/kota	33					33	33	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1					1	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
Yankes	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang sudah berizin	100					100	100	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	33					33	33	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6					6	3	
SDK	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (P2)	Persentase SDMK sesuai kompetensi jabatan	90					90	100	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan) di puskesmas	95					95	100	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan pendayagunaan tenaga kesehatan (dokter icon dan perawat ponkesdes) di puskesmas	133					10	10	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4					4	2	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk SDM Kesehatan	90					90	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan yang dilaksanakan	21					21	120	
SDK	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (P3)	Persentase Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standar	80					80	100	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang telah mendapat ijin operasional	100					100	115	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40					40	46	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang telah mendapatkan ijin edar	100					100	186	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70					70	130	
Kesmas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (P4)	Persentase desa siaga aktif	25					25	125	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Ormas dalam bidang Kesehatan	80					80	113	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3					3	6	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS Rumah Tangga sehat	65					65	77	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	9					9	19	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Balita yang dibina	100					100	108	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10					10	20	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (P5)	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	100					100	200	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	90					100	200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	5					5	10	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3					3	6	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	95					95	195	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	1.585					1.585	1.717	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	2					2	2	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	90					90	190	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1					1	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1					1	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2					2	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12					12	24	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	1					100	200	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1					0	0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1					1	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1					1	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90					90	190	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12					12	6	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12					12	6	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	80					80	180	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25					25	10	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeihara /direhabilitasi	1					1	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12					12	0	
	UOBF PUSKESMAS									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Persentase cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bid. Kesehatan	100					100	100	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan sesuai standar	100					100	100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25093					24.670	11.499	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24047					24047	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93860					93860	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0					24.522	11.794	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217968					217968	217968	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1112308					1112308	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190933					190933	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	402655					402655	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26695					26695	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3155					22.032	9.707	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19818					32.838	17036	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32864					32864	32864	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12					12	6	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan	12					12	6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12		4	4		12	,	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12					12	4	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah Dokumen Operasional Pelayanan puskesmas	33					33	6	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	33					33	33	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans kesehatan	33					33	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	33					33	0	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.282					4.282	2.141	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	242					242	0	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0					4	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaa pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0					4	2	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0					4	2	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	0					100	50	
	Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0					4	2	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa siaga aktif tk Puskesmas	100					100	50	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Balita yang dibina Puskesmas	100					100	50	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33					33	15	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	UPTD LABKESDA									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bid. Kesehatan	100					100	100	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan sesuai standar	100					100	100	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12					12	12	
	UOBK RSUD BANGIL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemanfaatan rumah sakit	100					100	100	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BOR Rumah Sakit	54					54	54	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1					1	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	80					80	80	
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	1%					1%	1%	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1					1	1	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1					1	1	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1					0	0	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1					0	0	
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	1					1	1	
	UOBK RSUD GRATI									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	100					100	100	
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	1					1	1	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit					2	2	
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	1 Paket					1	1	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1					0	0	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1					0	0	
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1 Unit					0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (P2)	Persentase pemanfaatan rumah sakit	100					100	100	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BOR Rumah Sakit	100					100	100	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan penunjang pelayanan Penunjang Pelayanan	1 Unit					1	1	

Tabel 2.1 diatas menunjukkan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan renja dinas kesehatan tahun 2024 , evaluasi hasil kinerja menunjukkan sampai dengan tribulan II, pencapain hasil kinerja di tribulan II tahun 2024 belum mencapai hasil optimal yang diharapkan. Hasil capai yang belum optimal terjadi pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, khususnya pada kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota. Pencapai yang tidak optimal pada beberapa sub kegiatan pada kegiatan tersebut di karenakan karena proses kontrak dengan penyedia yang terhambat, pada sub kegiatan yang belum optimal realisasinya terkait dengan proses Pembangunan/ pengadaan rehabilitasi puskesmas, penyediaan alat Kesehatan, obat , vaksin dan bahan habis pakai lainnya. Selain itu program lain yang belum tercapai kinerja secara optimal di tribulan II adalah Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Sedangkan kegiatan penyediaan layanan Kesehatan untuk upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan yang terkait dengan kegiatan promotive dan preventif di masyarakat dapat terrealisasikan secara optimal diantaranya kegiatan yang terkait dengan pencapaian 12 indikator SPM (standart pelayanan minimal) yaitu pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita , anak usia Pendidikan dasar, usia produktif , usia lansia, penyakit Deabetes militus, Hipertensi, orang dengan gangguan jiwa berat, tuberculosis dan HIV . Realisasi kinerja pada sub kegiatan pendukung SPM (Standart Pelayanan Minimal) dapat di capai hampir 50 persen dari target yang di tentukan dalam Renja tahun 2024. Selain dari kegiatan penyediaan layanan UKM dan UKP diatas, Program kegiatan lain yang kinerjanya mencapai sesuai yang di harapkan diantaranya Program pemberdayaan masyarakat dan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Tabel T 2.1.A Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Urusan Bidang Kesehatan					
Bidang Kesehatan					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	100	100	beberapa hal yang mendukung tercapainya pencapai target adalah sebagai berikut ;	beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya target adalah sebagai berikut ;	
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70	80	Adanya motivasi kerja yang tinggi dari sebagian personil khususnya terhadap kemajuan program kesehatan	Jumlah Sumberdaya manusia Kesehatan yang terbatas, sehingga masih banyak tenaga yang memegang tanggung jawab ganda.	melakukan rotasi pegawai dan usulan penambahan tenaga pelaksana dan fungsional, sehingga kegiatan dapat di laksanakan dan penyerapan anggaran bisa direalisasikan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	33	22	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan di berbagai jenjang / strata yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan yang yang mencukupi.	Belum didukung dengan Regulasi atau kebijakan sebagai dasar hukum ditingkat daerah.	identifikasi dan perencanaan kegiatan serta kebutuhan anggaran lebih di spesifik pada kegiatan yg berdampak langs.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)	1	1	Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap upaya program pembangunan kesehatan	Masih terdapat beberapa harga nilai satuan barnag yang lebih rendah di bandingkan pagu, dikarenakan ada penurunan barang, sehingga nilai serapan anggaran tidak bisa seratus persen.	menyusun update harga barang sesuai e katalog

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24	24	Adanya potensi masyarakat (Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain) yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya program kesehatan;	adanya perubahan kebijakan yang di keluarkan terlambat dari proses perencanaan, sehingga serapan dan realisasi kinerja tidak maksimal.	melibatkan stake holder dalam perencanaan kegiatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	40	40	Adanya dukungan dari pihak terkait baik lintas program dan lintas sektor terhadap program pembangunan kesehatan	Proses Kontrak dengan penyedia barang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan	Pengembangan komunikasi dan perubahan perilaku masyarakat dengan pemberdayaan
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	33	33			
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20	20			
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	34	34			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	1400	1400			
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80	80	beberapa hal yang mendukung tercapainya pencapaian target adalah sebagai berikut ;	beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya target adalah sebagai berikut ;	Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan :

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19818	19818	Adanya motivasi kerja yang tinggi dari sebagian personil khususnya terhadap kemajuan program kesehatan	Jumlah Sumberdaya manusia Kesehatan yang terbatas, sehingga masih banyak tenaga yang memegang tanggung jawab ganda.	melakukan rotasi pegawai dan usulan penambahan tenaga pelaksana dan fungsional, sehingga kegiatan dapat di laksanakan dan penyerapan anggaran bisa direalisasikan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32864	32864	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan di berbagai jenjang / strata yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan yang yang mencukupi.	Belum didukung dengan Regulasi atau kebijakan sebagai dasar hukum ditingkat daerah.	identifikasi dan perencanaan kegiatan serta kebutuhan anggaran lebih di spesifik pada kegiatan yg berdampak langs.
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	4	Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap upaya program pembangunan kesehatan	Masih terdapat beberapa harga nilai satuan barnag yang lebih rendah di bandingkan pagu, dikarenakan ada penurunan barang, sehingga nilai serapan anggaran tidak bisa seratus persen.	menyusun update harga barang sesuai e katalog
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.282	4.282		adanya perubahan kebijakan yang di dikeluarkan terlambat dari proses perencanaan, sehingg serapan dan realisasi kinerja tidak maksimal.	melibatkan stake holder dalam perencanaan kegiatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	242	242		Target yang di tentukan terlalu tinggi, tidak sesuai dengan sasaran riil yang ada di lapangan	Pengembangan komunikasi dan perubahan perilaku masyarakat dengan pemberdayaan
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	198	198			Perencanaan Sumber daya Manusia Kesehatan yang berkualitas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12	12			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	4			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	12			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1112308	1112308			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	402655	402655			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	26695	26695			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.174	3.174			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.490	6.490			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	196.973	196.973			
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	3	3			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25093	25093			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23953	23953			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	24047	24047			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	93860	93860			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	217968	217968			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	190933	190933			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	4			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	4			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	4			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	4			
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4	4			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12	12			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12	12			
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12	12			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36	36			
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12	12			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya /PMI	4	4			
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	33	33			
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1			
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100			
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	33	33			
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6	6			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (P2)	90	90	beberapa hal yang mendukung tercapainya pencapaian target adalah sebagai berikut ;	beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya target adalah sebagai berikut ;	Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan :
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	95	95	Adanya motivasi kerja yang tinggi dari sebagian personil khususnya terhadap kemajuan program kesehatan	Jumlah Sumberdaya manusia Kesehatan yang terbatas, sehingga masih banyak tenaga yang memegang tanggung jawab ganda.	melakukan rotasi pegawai dan usulan penambahan tenaga pelaksana dan fungsional, sehingga kegiatan dapat di laksanakan dan penyerapan anggaran bisa direalisasikan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	133	133	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan di berbagai jenjang / strata yang tersebar di	Belum didukung dengan Regulasi atau kebijakan sebagai dasar hukum ditingkat daerah.	identifikasi dan perencanaan kegiatan serta kebutuhan anggaran lebih di spesifik pada kegiatan yg berdampak langs.

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
			wilayah Kabupaten Pasuruan yang yang mencukupi.		
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	4	Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap upaya program pembangunan kesehatan	Masih terdapat beberapa harga nilai satuan barnag yang lebih rendah di bandingkan pagu, dikarenaka ada penurunan barang, sehingga nilai serapan anggaran tidak bisa seratus persen.	menyusun update harga barang sesuai e katalog
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90	90		adanya perubahan kebijakan yang di keluarkan terlambat dari proses perencanaan, sehingg serapan dan realisasi kinerja tidak maksimal.	melibatkan stake holder dalam perencanaan kegiatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21	21		Target yang di tentukan terlalu tinggi, tidak sesuai dengan sasaran riil yang ada di lapangan	Pengembangan komunikasi dan perubahan perilaku masyarakat dengan pemberdayaan
					Perencanaan Sumber daya Manusia Kesehatan yang berkualitas
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (P3)	80	80			
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	100			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40	40			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	100			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70	70			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (P4)	25	25			
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80	80			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	3			
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65	65			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	9	9			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10	10			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (P5)	100	100			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	90			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95	95			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.585	1.585			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	2			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	90			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1			
Pengadaan Mebel	1	1			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	90			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	80			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25	25			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
UOBF PUSKESMAS					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	100	100	beberapa hal yang mendukung tercapainya pencapai target adalah sebagai berikut ;	beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya target adalah sebagai berikut ;	Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan :
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	Adanya motivasi kerja yang tinggi dari sebagian personil khususnya terhadap kemajuan program kesehatan	Jumlah Sumberdaya manusia Kesehatan yang terbatas, sehingga masih banyak tenaga yang memegang tanggung jawab ganda.	melakukan rotasi pegawai dan usulan penambahan tenaga pelaksana dan fungsional, sehingga kegiatan dapat di laksanakan dan penyerapan anggaran bisa direalisasikan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25093	25093	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan di berbagai jenjang / strata yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan yang yang mencukupi.	Belum didukung dengan Regulasi atau kebijakan sebagai dasar hukum ditingkat daerah.	identifikasi dan perencanaan kegiatan serta kebutuhan anggaran lebih di spesifik pada kegiatan yg berdampak langs.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	24047	24047	Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap upaya program pembangunan kesehatan	Masih terdapat beberapa harga nilai satuan barang yang lebih rendah di bandingkan pagu, dikarenaka ada penurunan barang, sehingga nilai serapan anggaran tidak bisa seratus persen.	menyusun update harga barang sesuai e katalog
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	93860	93860		adanya perubahan kebijakan yang di keluarkan terlambat dari proses perencanaan, sehingga serapan dan realisasi kinerja tidak maksimal.	melibatkan stake holder dalam perencanaan kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	217968	217968		Target yang di tentukan terlalu tinggi, tidak sesuai dengan sasaran riil yang ada di lapangan	Pengembangan komunikasi dan perubahan perilaku masyarakat dengan pemberdayaan

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1112308	1112308			Perencanaan Sumber daya Manusia Kesehatan yang berkualitas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	190933	190933			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	402655	402655			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	26695	26695			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3155	3155			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	19818	19818			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	32864	32864			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	12			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	12			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	12			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12			
Operasional Pelayanan Puskesmas	33	33			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	33	33			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33	33			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	33	33			
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.282	4.282			
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	242	242			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	100			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33	33			
UPTD LABKESDA					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	100			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100			
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)	12	12			
UOBK RSUD BANGIL					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	80	80			
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1%	1%			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1	1			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1			
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	1	1			

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong	Faktor penghambat	Rencana Tindak Lanjut
UOBK RSUD GRATI					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	100			
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	1			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Unit	2 Unit			
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket			
Pengembangan Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Penilaian terhadap kondisi organisasi Dinas Kesehatan dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan SWOT dengan melibatkan seluruh Stakeholders melalui diskusi dua arah. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal yang melekat pada Dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Analisis Lingkungan Internal

2.2.1.1 Faktor kekuatan (strenght)

Beberapa faktor internal yang merupakan kekuatan dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan antara lain:

- 2.2.1.1.1 Tersedianya perangkat perundangan dari pemerintah baik dikeluarkan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai dasar hukum maupun landasan operasional program pembangunan di bidang kesehatan;
- 2.2.1.1.2 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang cukup yaitu RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes;
- 2.2.1.1.3 Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan di berbagai jenjang / strata yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 2.2.1.1.4 Adanya kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan formal dan non formal, pelatihan dan kegiatan – kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan personil;
- 2.2.1.1.5 Adanya motivasi kerja yang tinggi dari sebagian personil khususnya terhadap kemajuan program kesehatan;
- 2.2.1.1.6 Pelaksanaan mekanisme perencanaan dari bawah / Puskesmas dengan melibatkan staf, lintas sektor dan tokoh masyarakat sehingga ada transparansi serta tujuan yang dicapai mendekati pemecahan masalah riil masyarakat;
- 2.2.1.1.7 Tercapainya sebagian sasaran / target program kesehatan sehingga menjadi modal pendorong bagi pelaksanaan kegiatan berikutnya.

2.2.1.2 Faktor kelemahan (weakness)

Faktor internal yang merupakan kelemahan dalam melaksanakan program kesehatan antara lain:

- 2.2.1.2.1 Adanya perangkat tugas dan fungsi tenaga kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes dengan tugas pokok dan fungsi yang lain karena keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga terutama yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan proses manajemen kesehatan;
- 2.2.1.2.2 Adanya petugas yang berstatus pegawai tidak tetap sehingga mengurangi motivasi kerja;

- 2.2.1.2.3 Sebagian prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan belum memenuhi standar yang ada baik di RSUD, Puskesmas dan jaringannya.
- 2.2.1.2.4 Masih adanya pemberian pelayanan kesehatan yang belum sesuai dengan standart pelayanan, oleh karena rendahnya tingkat kepatuhan sebagian petugas terhadap Standart Operasional Prosedur (SOP);
- 2.2.1.2.5 Lemahnya pelaksanaan “Reward and Punishment” dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kesehatan dan jaringannya ;
- 2.2.1.2.6 Masih adanya petugas yang tidak berdomisili diwilayah kerja ;
- 2.2.1.2.7 Masih adanya petugas menempati posisi jabatan atau tempat tugas cukup lama sehingga timbul kejenuhan dengan segala akibatnya.

2.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal

2.2.2.1 Faktor Peluang (Opportunity)

Faktor eksternal yang merupakan peluang dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan antara lain:

- 2.2.2.1.1 Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap upaya program pembangunan kesehatan;
- 2.2.2.1.2 Adanya dukungan dari pihak terkait baik lintas program dan lintas sektor terhadap program pembangunan kesehatan;
- 2.2.2.1.3 Adanya implementasi Otonomi daerah termasuk bidang kesehatan yang memberikan peluang kepada Dinas Kesehatan untuk mengelola program pembangunan kesehatan mulai perencanaan sampai evaluasi / penilaian sesuai dengan kondisi daerah.
- 2.2.2.1.4 Lebih terbukanya peluang dukungan dana untuk pelaksanaan program kesehatan termasuk untuk program - program sosialisasi sepanjang ada konsep yang jelas dan rasional;
- 2.2.2.1.5 Adanya potensi masyarakat (Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain) yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya program kesehatan;
- 2.2.2.1.6 Adanya Rumah Sakit / Sarana pelayanan kesehatan swasta yang menjadi pesaing dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat menjadi motivasi dalam peningkatan mutu pelayanan.
- 2.2.2.1.7 Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan dengan BPJS (Badan Pemeliharaan Jamianan Sosial) bidang kesehatan.

2.2.2.2 Faktor ancaman (threath)

Faktor eksternal yang merupakan ancaman dalam pelaksanaan program kesehatan antara lain:

- 2.2.2.2.1 Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor karena adanya egoisme dan pola pikir sektoral diantara pihak-pihak yang berkoordinasi;
- 2.2.2.2.2 Belum berfungsinya secara maksimal pokja - pokja yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- 2.2.2.2.3 Penegakan hukum (law enforcement) khususnya dibidang kesehatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan;
- 2.2.2.2.4 Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya program kesehatan;
- 2.2.2.2.5 Pengetahuan dan kesadaran hukum sebagian masyarakat masih kurang khususnya dalam bidang kesehatan;
- 2.2.2.2.6 Adanya krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan khususnya pogram kesehatan ibu, anak dan gizi;
- 2.2.2.2.7 Masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap system / prosedur pelayanan, sikap petugas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh sarana kesehatan milik Pemerintah.
- 2.2.2.2.8 Masih adanya potensi timbulnya penyakit yang menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Tabel 2.2 / T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kesehatan			0,778	0,782	0,784	0,786	0,7816		0,784	0,786	
2	Angka Harapan Hidup (AHH)			70,55	70,82	70,96	71,09	70,81		70,96	71,09	
3	Angka Kematian Ibu (AKI)			78	77	76	75	61,64		61	60	
4	Angka Kematian Bayi (AKB)			3,3	3,2	3,1	3	3,55		3,1	3	
5	Prevalensi Balita Stunting			10	9,7	9,5	9	7,21		7,1	7	
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85,95	86,7	87,5	88	86,97		87	87,25	
7	Nilai SAKIP			82	82,25	82,5	83	81,85		81,95	82	
8	Pelayanan kesehatan ibu hamil	√	√	100	100	100	100	96,94		100	100	
9	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	√	√	100	100	100	100	100,43		100	100	
10	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	√	√	100	100	100	100	102,25		100	100	
11	Pelayanan kesehatan balita;	√	√	100	100	100	100	100,32		100	100	
12	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	√	√	100	100	100	100	100,62		100	100	
13	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	√	√	100	100	100	100	100,29		100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	√	√	100	100	100	100	98,02		100	100	
15	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	√	√	100	100	100	100	94,4		100	100	
16	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	√	√	100	100	100	100	104,76		100	100	
17	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	√	√	100	100	100	100	100,03		100	100	
18	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	√	√	100	100	100	100	107,48		100	100	
19	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	√	√	100	100	100	100	109,26		100	100	
20	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		√	0,08	0,09	0,09	0,09	0,07		0,08	0,08	
21	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		√	100	100	100	100	100		100	100	

Berdasarkan Tabel 2.2 / T.C.30 diatas menunjukkan tujuan Dinas Kesehatan pada indikator indeks kesehatan dengan capaian sebesar 0,7816 , capain ini telah memenuhi target yang di tetap yaitu 0, 778 untuk target tahun 2023. Keberhasilan dari pencapaian target INdeks Kesahatan didukung dengan beberpa indikator kinerja Dinas Keshatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Kesehatan dalam pencapain sasaran kinerja yang di tentukan . Peningkatan Indeks Kesehatan menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Indeks kesehatan kabupaten Pasuruan masih lebih rendah dari tingkat Propinsi dan tingkat Nasional hal ini dikarenakan pencapaian angka harapan hidup tingkat kabupaten yang juga masih lebih rendah dari tingkat propinsi dan Nasional. Angka harapan hidup merupakan variable yang menentukan nilai Indeks Kesehatan daerah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan terdiri dari 6 indikator, dari beberapa indikator tersebut yang mengalami kenaikan atau mencapai target yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai sebesar 70,81 tahun diatas target yang ditentukan yaitu 70,55 tahun , Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 61,64 per 100.000 kelahiran hidup dari target 78 per 100.000 kelahiran hidup, Prevlensi Balita Stunting mencapai sebesar 7,21 persen dari target yag di tentukan sebesar 10 persen , dan rata-rata indeks kepuasan Masyarakat mencapai sebesar 86, 97 persen lebih tinggi dari target yang di tentukan sebesar 85,95 persen . Sedangkan indikator kinerja Utama yang belum mencapai target yaitu angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 3,55 per 1000 kelahiran hidup lebih tinggi dari target yang ditentukan sebesar 3,3 per 1000 kelahiran hidup dan indikator nilai sakip dengan capaian 81,85 lebih rendah dari target yang ditentukan yaitu sebesar 82,00 di tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Keshatan di tahun 2023 tidak lepas dari beberapa hal diataranya ;

- a. Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program pemerintah di bidang kesehatan. Namun peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi keadaan Lingkungan yang kondusif dan sehat, ketersediaan pangan, Pendidikan, kebijakan pemerintah yang mendukung bidang kesehatan maupun perekonomian masyarakat yang lebih baik. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.
- b. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pasuruan masih lebih rendah di bandingkan dengan tingkat Propinsi dan Nasional, hal dikarenakan keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan layanan medis yang masih kurang untuk tingkat daerah, hal ini bisa kita lihat dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di daerah.

- c. Penurunan Prevalensi Balita Stunting tahun ini merupakan keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mengendalikan faktor langsung penyebab stunting seperti; asupan gizi balita melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pengendalian penyakit infeksi pada bayi dan balita, sedangkan faktor tidak langsungnya seperti : pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, asupan gizi Bumil, penanganan bumil risiko tinggi.
- d. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2023 menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dalam mengatasi faktor penyebab langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kematian ibu, sehingga masalah-masalah yang muncul pada proses kehamilan hingga ibu melahirkan dapat dicegah dan teratasi dengan tepat. Komplikasi yang terjadi pada ibu hamil merupakan faktor penyebab langsung dari kematian ibu dapat di cegah dan teratasi dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga.
- e. Pencapaian kinerja indikator Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2024 mengalami penurunan dengan meningkatnya kasus kematian bayi sebesar 3,55 per 1000 kelahiran hidup dari target yang di tentukan sebesar 3,30 per 1000 kelahiran hidup. Pencapaian kinerja tahun ini sebesar 99,42 % dalam kategori baik dari target yang di tentukan. Ada beberapa faktor pendukung penyebab meningkatnya kematian pada bayi diantaranya adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pasuruan sehingga berdampak pada kualitas kesehatan lingkungan masyarakat serta rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.
- f. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan dilatar belakangi oleh manajemen perencanaan, pengawasan, koordinasi dan kepemimpinan yang baik, serta peningkatan sarana prasarana fasilitas pelayanan Kesehatan yang sesuai standart. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menunjukkan Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pasuruan telah meningkat, untuk meningkatkan standart pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan telah melaksanakan survey reakreditasi kepada 33 unit fungsional Puskesmas di tahun 2023 dengan hasil 28 unit fungsional Puskesmas ter akreditasi Paripurna dan 2 Unit fungsional Puskesmas ter akreditasi Utama.
- g. Pencapaian indikator kinerja SAKIP perangkat daerah tahun 2024 sebesar 81,85 dalam kategori A mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, peningkatan nilai sakip ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan mampu mendorong terciptanya akuntabilitas pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya. serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah dalam hal system perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan.
Meskipun capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan mengalami peningkatan akan tetapi masih belum mencapai target yang ditentukan, hal ini dikarenakan target tahun 2023 yang ditentukan masih terlalu tinggi dan adanya variabel evaluasi yang

berbeda antar variabel evaluasi tahun 2022 dengan variabel evaluasi tahun 2023, sehingga masih terdapat dokumen evaluasi SAKIP yang belum bisa terpenuhi di tahun 2023.

Pencapaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan masih dibawah nilai SAKIP Provinsi. Nilai sakip secara Nasional belum menunjukkan hasil perhitungan, sehingga capaian Kabupaten hanya dapat dibandingkan dengan capaian Provinsi yang menunjukkan bahwa capaian Kabupaten masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi motivasi dalam melaksanakan hasil tindak lanjut penilaian SAKIP.

DATA KUNJUNGAN RSUD BANGIL TH 2020 -2021

Kasus	Rawat Jalan								Rawat Inap							
	2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
	Pasien Baru	Kunjungan	Pasien Baru	Kunjungan	Pasien Baru	Kunjungan	Pasien Baru	Kunjungan	Jumlah Pasien	Keluar Meninggal	Jumlah Pasien	Keluar Meninggal	Jumlah Pasien	Keluar Meninggal	Jumlah Pasien	Keluar Meninggal
Kanker (ICD X: C00-D89)	1490	5845	1264	5978	1863	7643			1346	115	1473	106	2344	160		
Jantung (ICD X: I00-I50)	1295	10968	1848	8473	2789	9079			956	213	643	155	1350	321		
Jantung Kongenital (ICD X: Q20-Q28)	20	67	6	30	48	73			3	3	14	8	35	0		
Stroke (ICD X: I60-I69)	396	1523	356	1136	597	1824			992	238	698	199	1469	401		
Uronefrologi (ICD X: N00-N39)	1311	7450	972	7727	1499	12410			1451	173	1704	154	3414	354		
bayi dan anak	1709	4000	1320	2745	1593	3596			1452	92	1269	103	1763	89		
Jumlah	6221	29853	5766	26089	8389	34625			6200	834	5801	725	10375	1325		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang kesehatan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis dibidang kesehatan yang meliputi upaya peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya pengobatan (kuratif) dan upaya pemulihan (rehabilitatif).

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan sebagai mana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan saat ini adalah :

Tabel 2.3 Isu- isu Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.

No	Permasalahan	Isu Aktual	IsuStrategis
1	Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai	Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif melalui ;
		rendah nya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan melalui ANC	Meningkatkan pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan Polindes menjadi Ponkesdes
		rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan ataupun UKBM (posyandu balita)	1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas, Pustu, Ponkesdes/ polindes di seluruh wilayah
		Masih adanya pernikahan usia muda dan usia muda melahirkan	2) Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas Kesehatan Ibu dan Anak.
		Belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor	3) Meningkatkan pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan Polindes menjadi Ponkesdes

No	Permasalahan	Isu Aktual	IsuStrategis
			4) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu
2	Rendahnya cakupan pelayanan pelayanan tuberculosis	rendahnya masyarakat untuk meng akses fasilitas kesehatan	5) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan
		Rendahnya Kesadaran masyarakat pentingnya Kesehatan diri	Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan kemitraan melalui ;
			1) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi Posyandu sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat
3	masih adanya balita stunting dan gizi buruk	Masih rendah nya akses makanan bergizi dan seimbang	2) Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga dengan icon program unggulan “Kader Asuh”
		Belum tercapainya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	3) Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan.
		Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tumbuh kembang balita	4) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan desa/kelurahan yang belum sanitasi sehat (Belum ODF)
		Rendahnya akses fasilitas kesehatan	5) Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan melalui -penyediaan jamban sehat
		balita menderita penyakit infeksi	Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring penyakit menular:
		rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan ataupun UKBM (posyandu balita)	1) Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak.

No	Permasalahan	Isu Aktual	IsuStrategis
			2) Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat dan pengembangan desa siaga penanggulangan bencana
4	Masih tingginya Desa/kelurahan belum ODF	Masih tingginya persentase masyarakat miskin di daerah	Penguatan manajemen kesehatan:
		masih tingginya tingkat pengangguran masyarakat	1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan ;
		Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat	2) Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDGs.
		Tingginya lulusan Pendidikan tingkat Atas	
5	Masih banyak masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan	Masih tingginya persentase masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrim di daerah	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan melalui ;
		masih tingginya tingkat pengangguran masyarakat	1) Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan menjadi 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah).
		Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat terkait pentingnya kebutuhan jaminan kesehatan	2) Meningkatkan pelaksanaan JKN- PBI dan JKN-PBID melalui prinsip-prinsip Asuransi
		Rendahnya kemampuan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan	3) Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan

No	Permasalahan	Isu Aktual	IsuStrategis
6	Meningkatnya kasus penyakit tidak menular :kanker, jantung, stroke, urorefrologi (KJSU)	Meningkatnya kasus baru dan kematian penyakit kanker	Penanggulangan penyakit tidak menular:kanker, jantung, stroke, urorefrologi (KJSU):
		Meningkatnya kasus baru dan meninggal pada penyakit jantung	Meningkatnya kualitas pelayanan melalui peningkatan layanan Penyakit (KJSU) RSUD dari status madya ke status utama
		Meningkatnya kasus baru dan meninggal penyakit stroke	Menurunnya kematian Penyakit (KJSU)
		Meningkatnya kasus baru dan meninggal pada penyakit urorefrologi	

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Kesehatan sebagai berikut adalah Peningkatan pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotive dan preventif, Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring penyakit menular serta Penanggulangan penyakit tidak menular:kanker, jantung, stroke, urorefrologi (KJSU). Isu-isu strategis tersebut didukung oleh

1. Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan pokok kegiatan sebagai berikut Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan pokok kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Sedangkan Isu strategi lainnya Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan kemitraan serta isu Penguatan manajemen kesehatan didukung dengan program ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pokok kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Administrasi keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan

Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan pokok kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Keterkaitan isu penting dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dengan Prioritas pembangunan tahun 2025 terkait dengan Prioritas ke-1 Pembangunan Daerah tahun 2025 yaitu Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat. Dalam mendukung Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2025 Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan promotive dan preventif melalui Upaya Meningkatkan pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan Polindes menjadi Ponkesdes, serta penambahan pembangunan Puskesmas Pembantu. Peningkatan Kualitas layanan dilakukan dengan meningkatkan status akreditasi Rumah sakit dan Puskesmas menjadi status akreditasi Paripurna, meningkatkan Penambahan layanan poli di rumah sakit. Sedangkan peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat dilakukan dengan upaya mendekatkan layanan kesehatan dasar dengan masyarakat melalui peningkatan peran Posyandu dalam integrasi layanan primer. Posyandu melaksanakan pelayanan kesehatan dari seluruh tahap usia dari usia 0 tahun sampai usia lanjut.

Isu yang kedua terkait penurunan penyakit degenerative adalah penyakit yang terjadi akibat penurunan organ dan jaringan tubuh yang terjadi secara perlahan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu meliputi diabetes, Hipertensi, kanker osteoarthritis dan penyakit degeneratif lainnya. Dinas Kesehatan sebagai pelaksana dalam pembangunan kesehatan melalui unit fungsional Puskesmas melaksanakan screening atau deteksi awal pada penyakit diabetes dan Hipertensi pada Masyarakat, sedangkan melalui unit organisasi bersifat khusus yaitu Rumah Sakit dengan Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan layanan Penyakit (KJSU) RSUD dari status madya ke status utama.

Isu yang ketiga terkait penurunan penyakit menular diantaranya penyakit Tuberkulosis dan HIV dan penyakit menular lainnya. Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi nya dalam menurunkan kasus penyakit menular melalui peningkatan perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat, meningkatkan Upaya-upaya dalam penemuan kasus lebih dini melalui screening pada sasaran yang beresiko atau yang terduga dan dilakukan pengobatan. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan termasuk peningkatan alat pemeriksaan.

Isu yang ke empat terkait penurunan AKI -AKB, Upaya-upaya yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu dengan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas, Pustu, Ponkesdes/ polindes di seluruh wilayah,) Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas Kesehatan Ibu dan Anak. Meningkatkan pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas sesuai standar tata

ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan Polindes menjadi Ponkesdes.

Dari tabel Isu- isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan diatas menunjukkan keterkaitan isu penting dengan proyek strategis tahun 2025 diantaranya terkait Penambahan 20 desa ODF (*open defecation free*). Isu penting ini menjadi proyek strategis di tahun 2025 dikarenakan masih tingginya desa/kelurahan belum ODF (*open defecation free*) , masih banyaknya desa/kelurahan yang ODF ini timbul dikarenakan masih tingginya masyarakat miskin dan miskin ekstrim di daerah, masih tingginya tingkat pengangguran akibat dari minimnya lapangan kerja dan tingginya lulusan sekolah tingkat atas, faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya beli masyarakat dalam melaksanakan sanitasi sehat melalui penyediaan jamban sehat, sehingga banyak masyarakat yang BAB sembarangan di tempat terbuka. Faktor lainnya yaitu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, Untuk mendukung proyek strategis pembangunan daerah tersebut, maka peran Dinas Kesehatan bekerjasama dengan lintas sector atau perangkat daerah lain untuk mengatasi masalah desa ODF. Dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat target yang diharapkan di tahun 2025 sudah 100 persen desa ODF di Kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan Proyek strategis tahun 2025 yang kedua dengan isu penting yaitu jaminan perlindungan kesehatan masyarakat (UHC) isu penting tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan melalui pelayanan jaminan kesehatan ditahun ini menargetkan seluruh masyarakat miskin dan miskin ekstrim di daerah diharapkan sudah mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat sehingga pembangunan daerah mampu meningkatkan pencapaian UHC (*universal Health Coverange*). Selain itu tingginya tingkat pengangguran masyarakat, rendahnya Pendidikan masyarakat dan rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan menjadi faktor pendukung rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan perlindungan kesehatan masyarakat (UHC). Melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2025 yang didukung Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat. Capaian kepesertaan masyarakat yang mendapat perlindungan jaminan Kesehatan untuk tahun 2023 sudah mencapai lebih dari 98 %, untuk tahun 2025 di harapkan lebih dari 99 persen.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan Program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam Renstra 2024-2026. Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusunan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan proyek strategis ttahun 2025 Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.4 (Tabel T-C. 31)

Pada analisis kebutuhan yang telah disinkronkan dengan kebutuhan dan pemutakhiran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900 .1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. terdapat penambahan, pemutakhiran dan penonaktifan pada kegiatan Penyediaan fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yaitu ;

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga.
2. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas Kesehatan.

Penambahan juga pada kegiatan Penyediaan fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yaitu ;

1. Pelayanan Kesehatan orang dengan penyakit penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular yang spesifik Kanker, Jantung, Stroke, Urorefrologi (KJSU) di wilayah kabupaten/kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Lainnya (LABKESDA)					
	DINAS				372.144.690.808					432.369.791.108	
	PKM + LABKESDA				109.916.406.963					114.156.491.517	
	JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN				482.061.097.771					546.554.591.025	
	UOBK RSUD BANGIL					UOBK RSUD BANGIL					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemanfaatan rumah sakit	100	155.000.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemanfaatan rumah sakit	100	271.280.356.077	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase BOR Rumah Sakit	54	155.000.000.000	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase BOR Rumah Sakit	54	271.280.356.077	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pasuruan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	155.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pasuruan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	271.280.356.077	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	80	72.950.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	80	16.113.144.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	1%	72.950.000.000	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	1%	16.113.144.000	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	20.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	-	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1	10.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	12.500.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	14.405.300.000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	1.000.000.000						

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan obat, vaksin	Kab. Pasuruan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	6.000.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	45 Paket	594.700.000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Pasuruan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	11.000.000.000						
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	450.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	1.113.144.000	
	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1	12.000.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1	-	
	JUMLAH ANGGARAN RSUD BANGIL				227.950.000.000					287.393.500.077	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja tahunan Dinas Kesehatan disusun melalui forum musrenbangdes, forum musrenbangcam bahkan forum Perangkat Daerah. Stakeholder menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk mematangkan / memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Dinas Kesehatan, selain harus mempedomi Renstra Dinas, Kepala Dinas Kesehatan juga harus mempertimbangkan hasil musrenbangkab/ RKPD Final.

Usulan dari Masyarakat yang terwakili dalam LSM adalah dari PKK Kabupaten Pasuruan dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pasuruan serta dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam kaitannya dengan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, usulan dari organisasi masyarakat.

TABEL 2. 5 (TC-32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PASURUAN

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Ket	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota					
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Purwodadi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	2	Rehab Puskesmas Pembantu (Gerbo dan Pucangsari)	Forum OPD / Aspirasi

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Ket	Catatan
			Pemeliharaan Oleh Puskesmas			
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Prigen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Rehab Puskesmas Pembantu Dayurejo	Aspirasi
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Bangil	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Rehab Puskesmas Pembantu Kalianyar	Aspirasi
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tosari	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Rehab Puskesmas Pembantu Sedang	Aspirasi
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Wonorejo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	Rehab Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karangmegah	Aspirasi , pokir
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Purwosari	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Rehab Puskesmas	Forum OPD
	Sub Kegiatan :Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puspo	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	Puskesmas induk dan pustu Janjang wulung	Aspirasi
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Gempol	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan	1	Puskesmas Pembantu Jeruk purut	Aspirasi

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Ket	Catatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a					
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Seluruh Puskesmas di di Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	Sosialisasi Penanganan stunting	Forum OPD / Aspirasi
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Baji, Gempol , Bangil, Rejoso, Grati, Kejayan, Lekok, Nguling, Purwosari, Tutur, Purwodadi, Puspo, Tosari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	Sosialisasi Penanganan stunting	Pokir
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Purwosari, Tutur, Purwodadi, Puspo, Tosari, Kraton, Rembang , Pohjentrek , Rejoso	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	Pendampingan Penanganan Kasus Ibu Hamil Resiko Tinggi (Bumil Risti)	Pokir
	sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Seluruh Puskesmas di di Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	Sosialisasi pencegahan dan penanggulan n penyakit menular dan tidak menular	Forum OPD
	sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Baji, Gempol , Bangil, Prigen, Rejoso, Grati, Kejayan, Lekok,	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	Sosialisasi pencegahan dan penanggulan n penyakit menular dan tidak menular	Pokir

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Ket	Catatan
		Nguling, Purwosari, Tutur, Purwodadi, Puspo, Tosari				
	sub Kegiatan: Penyelenggaraa n Kabupaten/Kota Sehat	Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n kabupaten / kota sehat	1	Hibah FKPS	Forum OPD , Aspirasi
	Operasional Pelayanana Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bangil	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan faskes lainnya	1	hibah PMI	Forum OPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Dalam RPJMN 2020-2025, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2025 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2025, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan
4. Kedaruratan kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan sumber daya kesehatan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovati.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Kebijakan Satuan Kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Penggerakan dan Pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat.
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Peningkatan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.
4. Peningkatan pembiayaan kesehatan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Dalam kedudukan sebagai unsur Pemerintah di bidang kesehatan serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026, maka Dinas Kesehatan berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kondisi tersebut akan diukur melalui indikator-indikator kesehatan.

Adapun dari tiga tujuan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026. Dinas Kesehatan mendukung tujuan Pembangunan Daerah yaitu pada Tujuan ke dua “ *Meningkatnya Kesejahteraan, Kualitas Hidup Masyarakat.*” di kabupaten Pasuruan, dengan sasaran Pembangunan Daerah yaitu “*Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia*”.

Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/ bidang kewenangannya dalam pembangunan bidang kesehatan.

Berdasarkan Sasaran Pembangunan Daerah diatas, untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut maka Dinas Kesehatan menetapkan tujuannya yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin di capai Dinas Kesehatan maka di tetapkan sasaran sebagai berikut ;

Sasaran pertama: Meningkatnya status kesehatan Keluarga, dengan mempunyai indikator sasaran:

1. Angka Harapan Hidup (AHH)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kematian Ibu (AKI)
4. Prevalensi Balita Stunting

Sasaran Kedua: Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesehatan, dengan indikatornya;

1. Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Sasaran Ketiga: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. mempunyai indikator sasaran :

1. Nilai SAKIP.

Tabel 3.2. A
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,782	0,782	0,784
Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,81	70,82	70,96
	Angka Kematian Ibu (AKI)	61,64	77	76
	Angka Kematian Bayi (AKB)	3,55	3,2	3,1
	Prevalensi Balita Stunting	7,21	9,7	9,5
Meningkatnya Kepuasan Layanan Kesehatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,97	86,7	87,5
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,85	82,25	82,5
Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	96,94	100	100
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100,43	100	100
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	102,25	100	100
	Pelayanan kesehatan balita;	100,32	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	100,62	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,29	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	98,02	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	94,4	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	104,76	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	100,03	100	100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	107,48	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	109,26	100	100
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,07	0,09	0,09
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100

Tabel 3.2.B Sinkronisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Umum (IKU)

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulas i	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,39	Indeks Kesehatan	AHH dikurangi AHH minimal dibagi AHH maksimal dikurangi AHH minimal. UHH min = 20 tahun UHH maks = 85 tahun Indeks Kesehatan $I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$	0,782	Seluruh Program di Dinas Kesehatan
			Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir, Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel. (Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik)	70,96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Kematian ibu di kab. Pas pad akurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di kab. Pas dalam kurun waktu tertentu dikali 100.000 KH	76	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)
			Angka Kematian Bayi (AKB)	jumlah bayi (berumur < 1th) yg meninggal di kab.pas pd kurun wkt tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di kab.pas pd kurun wkt tertentu kali 1000 KH	3,1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita yang menderita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu dibagi dengan Jumlah anak balita yang di ukur pada lurun waktu tertentu dikali 100 %	9,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (P4)
			Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Nilai IKM seluruh Puskesmas, Rumah sakit , labkesda dan dinas kesehatan dibagi jumlah Puskesmas, Rumah sakit, labkesda dan dinas kesehatan di kali 100 %	87,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (P3)
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (P2)
			Nilai SAKIP	Hasil Penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat	82,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (P2)

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 ini terdiri dari beberapa program dan didalam program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk dapat dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu, dan didalam kegiatan didukung beberapa sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dari kegiatan. Pada rencana kerja tahun 2025 Dinas Kesehatan terdapat 5 program, 16 kegiatan, 75 sub kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan, yang merupakan program dan kegiatan langsung ke masyarakat adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
 - 1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
 - 1.1.1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 1.1.2 Pengembangan Rumah sakit
 - 1.1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 - 1.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 1.1.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.6 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.7 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.8 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
 - 1.1.9 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan
 - 1.1.10 Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi
 - 1.1.11 Distribusi Alat Kesehatan, obat, vaksin, BMHP, Makanan dan minuman ke Puskesmas dan faskes lainnya(GFK).
 - 1.1.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga
 - 1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 1.2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 1.2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 1.2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 1.2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 1.2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 1.2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 1.2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 1.2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 1.2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
 - 1.2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 1.2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

- 1.2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 1.2.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
- 1.2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 1.2.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 1.2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 1.2.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 1.2.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- 1.2.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 1.2.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 1.2.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan penyakit penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota
- 1.2.23 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- 1.2.24 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 1.2.25 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 1.2.26 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 1.2.27 Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 1.2.27.1 Operasional Pelayanan Puskesmas Purwodadi
 - 1.2.27.2 Operasional Pelayanan Puskesmas Nongkojajar
 - 1.2.27.3 Operasional Pelayanan Puskesmas Sumberpitu
 - 1.2.27.4 Operasional Pelayanan Puskesmas Puspo
 - 1.2.27.5 Operasional Pelayanan Puskesmas Tosari
 - 1.2.27.6 Operasional Pelayanan Puskesmas Lumbang
 - 1.2.27.7 Operasional Pelayanan Puskesmas Pasrepan
 - 1.2.27.8 Operasional Pelayanan Puskesmas Kejayan
 - 1.2.27.9 Operasional Pelayanan Puskesmas Ambal-ambil
 - 1.2.27.10 Operasional Pelayanan Puskesmas Wonorejo
 - 1.2.27.11 Operasional Pelayanan Puskesmas Purwosari
 - 1.2.27.12 Operasional Pelayanan Puskesmas Karangrejo
 - 1.2.27.13 Operasional Pelayanan Puskesmas Prigen
 - 1.2.27.14 Operasional Pelayanan Puskesmas Bulukandang
 - 1.2.27.15 Operasional Pelayanan Puskesmas sukorejo
 - 1.2.27.16 Operasional Pelayanan Puskesmas Pandaan
 - 1.2.27.17 Operasional Pelayanan Puskesmas Seban
 - 1.2.27.18 Operasional Pelayanan Puskesmas Gempol
 - 1.2.27.19 Operasional Pelayanan Puskesmas Kepulungan
 - 1.2.27.20 Operasional Pelayanan Puskesmas Beji
 - 1.2.27.21 Operasional Pelayanan Puskesmas Bangil
 - 1.2.27.22 Operasional Pelayanan Puskesmas Raci
 - 1.2.27.23 Operasional Pelayanan Puskesmas Rembang
 - 1.2.27.24 Operasional Pelayanan Puskesmas Kraton
 - 1.2.27.25 Operasional Pelayanan Puskesmas Ngempit
 - 1.2.27.26 Operasional Pelayanan Puskesmas Pohjentrek
 - 1.2.27.27 Operasional Pelayanan Puskesmas Gondangwetan
 - 1.2.27.28 Operasional Pelayanan Puskesmas Rejoso

- 1.2.27.29 Operasional Pelayanan Puskesmas Winongan
 - 1.2.27.30 Operasional Pelayanan Puskesmas Grati
 - 1.2.27.31 Operasional Pelayanan Puskesmas Kedawungwetan
 - 1.2.27.32 Operasional Pelayanan Puskesmas Lekok
 - 1.2.27.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Nguling
 - 1.2.28 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Operasional Labkesda)
 - 1.2.29 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - 1.2.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.2.31 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - 1.2.32 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - 1.2.33 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
 - 1.2.34 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
 - 1.2.35 Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
 - 1.2.36 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
 - 1.2.37 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - 1.3 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 1.3.2 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 1.4 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - 1.4.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan pokok kegiatan sebagai berikut :
- 2.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2.1.2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / kota
 - 2.2.1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai Standart (insentif Covid)
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan pokok kegiatan :
- 3.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))
 - 3.1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 3.2 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- 3.2.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan pokok kegiatan :
 - 2.1 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2.1.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - 2.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
 - 2.3 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pokok kegiatan :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.4 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 1.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.4.3 Pengadaan Mebel
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.7 Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.7.1 .Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD

Tabel. 3.3.1 Pemetaan Nomenklatur Prog/Keg/Subkeg Pada Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Terhadap SIPD.

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
x.xx	Urusan Pemerintahan Bidang kesehatan					x.xx	Urusan Pemerintahan Bidang kesehatan			
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota (5)	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	persen		x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota (5)	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	persen
x.xx.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	persen		x.xx.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	persen
x.xx.01.1.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	dokumen		x.xx.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	dokumen
x.xx.01.1.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan		x.xx.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan
x.xx.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya pelaksanaan administrasi keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	persen		x.xx.01.2.0 2	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Terlaksanannya pemenuhan administrasi keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	persen
x.xx.01.1.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan		x.xx.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan
x.xx.01.1.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen		x.xx.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen
x.xx.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	persen		x.xx.01.2.0 6	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakh iran; atau - Penonakti fan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
x.xx.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket		x.xx.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket
x.xx.01.1.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket		x.xx.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket
x.xx.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket		x.xx.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket
x.xx.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan		x.xx.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan
x.xx.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang Pemerintah daerah yang tersedia	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	persen		x.xx.01.2.0 7	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	persen
x.xx.01.1.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	unit		x.xx.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	unit
x.xx.01.1.0 7.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket		x.xx.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit
x.xx.01.1.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnyayang disediakan	unit		x.xx.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnyayang disediakan	unit
x.xx.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah yang tersedia	persen		x.xx.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daearh	Persentase jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah yang tersedia	persen
x.xx.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan		x.xx.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
x.xx.01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		x.xx.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan
x.xx.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan baraaang milih daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	persen		x.xx.01.2.0 9	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	persen
x.xx.01.1.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit		x.xx.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit
x.xx.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeihara /direhabilitasi	unit		x.xx.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeihara /direhabilitasi	unit
x.xx.01.1.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit		x.xx.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit
1.02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan					1.02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terkelolanya fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentasae Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	persen		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Terkelolanya fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentasae Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakh iran; atau - Penonakti fan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							KESEHATAN MASYARAKAT (P1)			
1.02.02.2. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya sarana dan prasarana faskes sesuai standart	Persentase Sarana dan Prasarana Faskes Sesuai Standar	persen		1.02.02.2. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya sarana dan prasarana faskes sesuai standart	Persentase Sarana dan Prasarana Faskes Sesuai Standar	persen
1.02.02.2. 01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit		1.02.02.2. 01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit
1.02.02.2. 01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit		1.02.02.2. 01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit
1.02.02.2. 01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	Penonaktif an					
1.02.02.2. 01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit		1.02.02.2. 01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2. 01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	unit		1.02.02.2. 01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	unit
1.02.02.2. 01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	1.02.02.2. 01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Paket
1.02.02.2. 01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Paka	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran					
1.02.02.2. 01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit		1.02.02.2. 01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit
1.02.02.2. 01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	Pemutakhiran	1.02.02.2. 01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, Vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						1.02.02.2. 01.0024	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan intervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular	persen		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular	persen
									Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular sesuai standar	persen
									Persentase Penanganan Kasus KLB yang ditangani < 24 jam	persen
									Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu	persen
									Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir dan Balita sesuai Standart	persen
									Persentase pelayanan Kesehatan Bayi Paripurna	persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakh iran; atau - Penonakti fan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Persentase cakupan UHC	persen
									Persentase Layanan Kesehatan Primer dan Rujukan sesuai standart	persen
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan pelayanan SPM	persen		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan pelayanan SPM	persen
									Persentase Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	persen
									Persentase balita Gizi buruk	persen
									Persentase Keluarga dengan Jamban Sehat	persen
									Persentase Fasyankes Melaksanakan Layanan Telemedicine	persen
									Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas.	persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2. 02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standart	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standart	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standart	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standart	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standart	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis y	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2. 02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen		1.02.02.2. 02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen
1.02.02.2. 02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	dokumen		1.02.02.2. 02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	dokumen
1.02.02.2. 02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	dokumen		1.02.02.2. 02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	dokumen
1.02.02.2. 02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan	dokumen		1.02.02.2. 02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan	dokumen
1.02.02.2. 02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen		1.02.02.2. 02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen
1.02.02.2. 02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dokumen		1.02.02.2. 02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dokumen
1.02.02.2. 02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen		1.02.02.2. 02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2. 02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan pelayanan kesehatan	orang		1.02.02.2. 02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan pelayanan kesehatan	orang
1.02.02.2. 02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan khusus	dokumen	Penonaktifan					
1.02.02.2. 02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen		1.02.02.2. 02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen
1.02.02.2. 02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	dokumen		1.02.02.2. 02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	dokumen
1.02.02.2. 02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat	dokumen		1.02.02.2. 02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat	dokumen
1.02.02.2. 02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit		1.02.02.2. 02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2. 02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen		1.02.02.2. 02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen
1.02.02.2. 02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten/kota	unit		1.02.02.2. 02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten/kota	unit
1.02.02.2. 02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan		1.02.02.2. 02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan
1.02.02.2. 02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit		1.02.02.2. 02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit
1.02.02.2. 02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan kabupaten / kota sehat	dokumen		1.02.02.2. 02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan kabupaten / kota sehat	dokumen
1.02.02.2. 02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang		1.02.02.2. 02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	tatanan		1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	tatanan
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	Pemutakhiran					
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Fasyankes yang sudah berijin	Persentase Fasyankes yang sudah berizin	persen		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Fasyankes yang sudah berijin	Persentase Fasyankes yang sudah berizin	persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2. 04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit		1.02.02.2. 04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit
1.02.02.2. 04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen		1.02.02.2. 04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (P2)	Tersedianya SDM sesuai kompetensi jabatan	Persentase SDM sesuai kompetensi jabatan	persen		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (P2)	Tersedianya SDM sesuai kompetensi jabatan	Persentase SDM sesuai kompetensi jabatan	persen
1.02.03.2. 02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemenuhan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan) di puskesmas	Persentase pemenuhan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan) di puskesmas	persen		1.02.03.2. 02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemenuhan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan) di puskesmas	Persentase pemenuhan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan) di puskesmas	persen
1.02.03.2. 02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah pemenuhan pendayagunaan tenaga kesehatan (dokter icon dan perawat ponkesdes) di puskesmas	orang		1.02.03.2. 02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi Standart di fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes)	orang

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan kompetensi untuk SDM Kesehatan	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk SDM Kesehatan	persen		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan kompetensi untuk SDM Kesehatan	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk SDM Kesehatan	persen
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan yang dilaksanakan	orang		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (P3)	Terpenuhinya Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standar	Persentase Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standar	persen		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (P3)	Terpenuhinya Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standar	Persentase Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standar	persen
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang telah mendapat ijin operasional	Persentase Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang telah mendapat ijin operasional	persen		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang telah mendapat ijin operasional	Persentase Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang telah mendapat ijin operasional	persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.04.2. 01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen		1.02.04.2. 01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen
1.02.04.2. 03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terkelolanya P-IRT yang telah mendapatkan ijin edar	Persentase P-IRT yang telah mendapatkan ijin edar	persen		1.02.04.2. 03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terkelolanya P-IRT yang telah mendapatkan ijin edar	Persentase P-IRT yang telah mendapatkan ijin edar	persen
1.02.04.2. 03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen		1.02.04.2. 03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (P4)	Terwujudnya Desa Siaga aktif	Persentase desa siaga aktif	persen		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (P4)	Terwujudnya Desa Siaga aktif	Persentase desa siaga aktif	persen
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kemitraan Ormas dalam bidang Kesehatan	Persentase Kemitraan Ormas dalam bidang Kesehatan	persen		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kemitraan Ormas dalam bidang Kesehatan	Persentase Kemitraan Ormas dalam bidang Kesehatan	persen
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya PHBS Rumah Tangga sehat	Persentase PHBS Rumah Tangga sehat	persen		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya PHBS Rumah Tangga sehat	Persentase PHBS Rumah Tangga sehat	persen
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	keluarga		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	keluarga
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pembinaan Posyandu Balita	Persentase Posyandu Balita yang dibina	persen		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pembinaan Posyandu Balita	Persentase Posyandu Balita yang dibina	persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.05.2. 03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen		1.02.05.2. 03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen
	UOBF PUSKESMAS									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terlaksannnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase Cakupan SPM Bidang Kesehatan	persen		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terlaksannnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase Cakupan SPM Bidang Kesehatan	persen
1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standart	Persentase layanan kesehatan sesuai standar	persen		1.02.02.2. 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standart	Persentase layanan kesehatan sesuai standar	persen
1.02.02.2. 02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakh iran; atau - Penonakti fan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2. 02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang		1.02.02.2. 02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang
1.02.02.2. 02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	dokumen		1.02.02.2. 02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	dokumen
1.02.02.2. 02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan	dokumen		1.02.02.2. 02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan	dokumen
1.02.02.2. 02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen		1.02.02.2. 02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen
1.02.02.2. 02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	dokumen		1.02.02.2. 02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	dokumen
1.02.02.2. 02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (33 PUSKESMAS)	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah Dokumen Operasional Pelayanan puskesmas	dokumen		1.02.02.2. 02.0023	Operasional Pelayanan Puskesmas (33 PUSKESMAS)	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah Dokumen Operasional Pelayanan puskesmas	dokumen
1.02.02.2. 02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans kesehatan	dokumen		1.02.02.2. 02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans kesehatan	dokumen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen
						1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan
						1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang
						1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang
						1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen
						1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	dokumen
						1.02.02.2.02.0046	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersediannya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	Persentase penyelenggaraan sistem informasi secara terintegrasi	persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (P4)	Terkelolanya Desa siaga aktif di Tingkat Puskesmas	Persentase desa siaga aktif tk Puskesmas			1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (P4)	Terkelolanya Desa siaga aktif di Tingkat Puskesmas	Persentase desa siaga aktif tk Puskesmas	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan posyandu Balita	Persentase Posyandu Balita yang dibina	persen		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan posyandu Balita	Persentase Posyandu Balita yang dibina Puskesmas	persen
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen
	UPTD LABKESDA									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terlaksannnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase Cakupan SPM Bidang Kesehatan			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terlaksannnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase Cakupan SPM Bidang Kesehatan	

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase layanan kesehatan sesuai standar	persen		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase layanan kesehatan sesuai standar	persen
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen
	UOBK RSUD BANGIL									
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Terkelolanya pemanfaatan rumah sakit	Pemanfaatan Rumah Sakit	persen		x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Terkelolanya pemanfaatan rumah sakit	Pemanfaatan Rumah Sakit	persen
x.xx.01.1.1.0	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase BOR Rumah Sakit	persen		x.xx.01.1.1.0	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase BOR Rumah Sakit	persen
x.xx.01.1.1.0.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja		1.02.02.2.02.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terlaksanannya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	persen		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Terlaksanannya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	persen

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							KESEHATAN MASYARAKAT (P1)			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	persen		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	persen
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit		1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	unit		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	unit
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	Penonaktifan					

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2. 01.16	Pengadaan obat, vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	Pemutakhiran	1.02.02.2. 01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Paket
1.02.02.2. 01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	Pemutakhiran					
1.02.02.2. 01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit		1.02.02.2. 01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit
1.02.02.2. 01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	unit		1.02.02.2. 01.0005	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	unit

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	UOBK RSUD GRATI									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terlaksananya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	persen		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1)	Terlaksananya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	persen
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	persen		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	persen
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit		1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit
1.02.02.2.01.08.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	unit		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	unit
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIK ASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02.02.2. 01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	Penonaktifan					
1.02.02.2. 01.16	Pengadaan obat, vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	Pemutakhiran	1.02.02.2. 01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Paket
1.02.02.2. 01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	Pemutakhiran					
1.02.02.2. 01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit		1.02.02.2. 01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit
1.02.02.2. 01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	unit		1.02.02.2. 01.0015	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	unit

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2025				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Terkelolanya pemanfaatan rumah sakit	Persentase pemanfaatan rumah sakit	persen		x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Terkelolanya pemanfaatan rumah sakit	Persentase pemanfaatan rumah sakit	persen
x.xx.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase BOR Rumah Sakit	persen		x.xx.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase BOR Rumah Sakit	persen
x.xx.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja		x.xx.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025.

Program , kegiatan dan sub kegiatan didalam rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025 khususnya yang terkait dengan peningkatan kualitas dan akses layanan dasar diantaranya ;

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatannya adalah :
 - a. Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui beberapa sub kegiatan;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan
 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui beberapa sub kegiatan :
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada balita
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa subkegiatan ;
 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tabel 3.3.2 Program, kegiatan dan sub kegiatan Pendukung Prioritas daerah Tahun 2025

IKU	Tema 2025	Prioritas Pembangunan		Subkegiatan	Kegiatan	Program	Proyek Strategis
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angka harapan hidup (AHH)	Peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif	Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat	Penurunan Penyakit degeneraif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
			Penurunan penyakit menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
			Penurunan AKI AKB	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Angka Kematian Ibu (AKI)							
Angka Kematian Bayi (AKB)							

IKU	Tema 2025	Prioritas Pembangunan		Subkegiatan	Kegiatan	Program	Proyek Strategis
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Prevalensi Balita Stunting				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
			Penurunan prevalensi stunting	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC)
				Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada balita			Penambahan 20 desa ODF
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
				Penyelenggaraan Kab/Kta Sehat			
			Peningkatan Sarpras Faskes Tingkat Pertama	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC)
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)			
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			
Rata2 Indeks Kepuasan Masyarkat terhadap pelayanan							

IKU	Tema 2025	Prioritas Pembangunan		Subkegiatan	Kegiatan	Program	Proyek Strategis
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan			
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			

3.3.3 Program Kegiatan dan sub kegiatan Pendukung Proyek Strategis Daerah Tahun 2025.

Program , kegiatan dan sub kegiatan didalam rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 yang mendukung Proyek Strategis Pembangunan Daerah tahun 2025 khususnya yang terkait dengan Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC) dan Penambahan 20 desa ODF diantaranya;

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (P1) dengan dengan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui beberapa sub kegiatannya adalah ;
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan meliputi rencana kerja Dinas Kesehatan, UOBK RSUD Grati, UOBK RSUD BANGIL, UOBF Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. Rencana kerja ini terdiri dari beberapa program dan didalam program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk dapat dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu, yang dimana pada Dinas Kesehatan terdapat 5 program, 16 kegiatan, 71 sub kegiatan, UOBF Puskesmas sebanyak 21 sub kegiatan dan UPTD Labkesda 1 sub kegiatan. Adapun Rencana Kerja dan pendanaan pada Dinas Kesehatan di jabarkan pada rincian tabulasi Rumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 berikut pada tabel di bawah ini :

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Kine rja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan penunjang pelayanan Penunjang Pelayanan	Kec. Bangil- Pasuru an	1			271.280.356.077, 00	blud		1	160.000.000.000
								Belanja operasi		:	271.280.356.077			
								Belanja pegawai		:	Rp -			
								Belanja barang dan jasa		:	Rp -			
								Belanja bunga		:	Rp -			
								Belanja subsidi		:	Rp -			
								Belanja hibah		:	Rp -			
								Belanja bantuan sosial		:	Rp -			
								Belanja modal		:	Rp -			
								Belanja tidak terduga		:	Rp -			
								Belanja transfer		:	Rp -			
										:				

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Kine rja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					Sumber Dana	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)	(9)	(10)	(11)
(diis i)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Persentase Capaian SPM Rumah Sakit		80				16.113.144.000			80	75.450.000.000
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar		1%				16.113.144.000			1%	75.450.000.000
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kec. Bangil -Pasu ruan	1				Rp -	DBHCHT		1	20.000.000.000
								Belanja operasi		:	-				
									Belanja pegawai	:	Rp -				
									Belanja barang dan jasa	:	Rp -				
									Belanja bunga	:	Rp -				
									Belanja subsidi	:	Rp -				
									Belanja hibah	:	Rp -				
									Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
								Belanja modal		:	Rp -				
								Belanja tidak terduga		:	Rp -				

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Kine rja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
								Belanja transfer		:	Rp -			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Kec. Bangil -Pas uruan	1 unit				Rp -	DBHCHT	1 unit	10.000.000.000
								Belanja operasi		:	-			
									Belanja pegawai	:	Rp -			
									Belanja barang dan jasa	:	Rp -			
									Belanja bunga	:	Rp -			
									Belanja subsidi	:	Rp -			
									Belanja hibah	:	Rp -			
									Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
								Belanja modal		:	Rp -			
								Belanja tidak terduga		:	Rp -			
								Belanja transfer		:	Rp -			

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Kine rja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kec. Bangil -Pasur uan	2 Unit			Rp 14.405.300.000	DBHCHT		2 Unit	13.000.000.000
								Belanja operasi		:	14.405.300.000			
								Belanja pegawai		:	Rp -			
								Belanja barang dan jasa		:	Rp -			
								Belanja bunga		:	Rp -			
								Belanja subsidi		:	Rp -			
								Belanja hibah		:	Rp -			
								Belanja bantuan sosial		:	Rp -			
								Belanja modal		:	Rp -			
								Belanja tidak terduga		:	Rp -			
								Belanja transfer		:	Rp -			
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kec. Bangil -Pasu ruan	45 Paket			Rp 594.700.000	DBHCHT		45 Paket	19.000.000.000

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Kine rja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
								Belanja operasi		:	594.700.000			
									Belanja pegawai	:	Rp -			
									Belanja barang dan jasa	:	Rp -			
									Belanja bunga	:	Rp -			
									Belanja subsidi	:	Rp -			
									Belanja hibah	:	Rp -			
									Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
								Belanja modal		:	Rp -			
								Belanja tidak terduga		:	Rp -			
								Belanja transfer		:	Rp -			
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kec. Bangil- Pasuru an	10 unit				Rp 1.113.144.000	DBHCHT	10 unit	450.000.000
								Belanja operasi		:	1.113.144.000			
									Belanja pegawai	:	Rp -			
									Belanja barang dan jasa	:	Rp -			

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Kine rja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
								Belanja bunga	:	Rp -				
								Belanja subsidi	:	Rp -				
								Belanja hibah	:	Rp -				
								Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
								Belanja modal	:	Rp -				
								Belanja tidak terduga	:	Rp -				
								Belanja transfer	:	Rp -				
					Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Kec. Bangil-Pasuruan	1 Unit		Rp -	DBHCHT		1 Unit 13.000.000.000
								Belanja operasi	:	-				

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Kine rja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
								Belanja pegawai	:	Rp -				
								Belanja barang dan jasa	:	Rp -				
								Belanja bunga	:	Rp -				
								Belanja subsidi	:	Rp -				
								Belanja hibah	:	Rp -				
								Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
								Belanja modal	:	Rp -				
								Belanja tidak terduga	:	Rp -				
								Belanja transfer	:	Rp -				
										287.393.500.077				235.450.000.000
										895.260.994.665				909.771.763.888

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Catatan Penting yang perlu diperhatikan

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Kode sub kegiatan, kinerja sub kegiatan dan indikator sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (*bottom up*) maupun dari stakeholder terkait diupayakan dapat tertampung lewat Musrenbang Kecamatan ataupun melalui Forum Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang dapat menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Disamping itu, penyusunan Renja Tahun 2025 ini merupakan bagian dari alur pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Perangkat Daerah karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 1. Penyusunan RKA ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

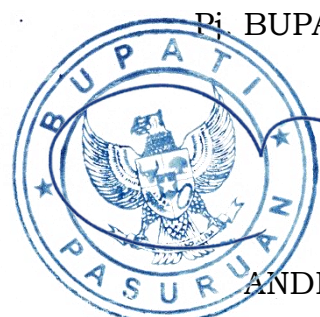
1. Seluruh Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;
2. Meningkatkan atau optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala BAPPELITBANGDA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
4. Hasil pemantauan dan supervise digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dana indikatif dan indiator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA dengan Renja Perangkat Daerah.

Pi. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO